

Geopolitik Masa Bali Kuno: Aktivitas Perdagangan Wilayah Pedalaman dan Pesisir Berdasarkan Sumber Prasasti

Geopolitics of Ancient Bali: Trade Activities in Hinterland and Foreland Based on Inscription

Si Gede Bandem Kamandalu¹

¹Alumni Mahasiswa Arkeologi, Universitas Udayana

Jalan Pulau Nias No. 13, Dauh Puri Klod, Denpasar, Indonesia

Email penulis koresponden: bandemkamandalu@gmail.com

ABSTRACT

Difference in resources and the nature of each region is one of the driving factors for trade activities. Based on this, it can be said that geographical conditions greatly influence government policies, including in terms of trade. Therefore, this research attempts to answer problems regarding the interconnection of trade in inland and coastal areas during the ancient Balinese period. A geopolitical approach is used to dissect existing data, remember this study is related to politics and territory. The research process includes data collection, data analysis, and data interpretation. The primary data used are several ancient Balinese inscriptions which are related to trade activities and which are found in the interior and northern coastal areas of Bali. The research results show that geopolitically there were divisions into production and distribution zones during that period.

Keywords: trade; geopolitics; Ancient Bali

ABSTRAK

Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap wilayah menjadi salah satu faktor pendorong timbulnya aktivitas perdagangan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi geografis sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah termasuk dalam hal perdagangan. Maka dari itu, penelitian ini berupaya untuk menjawab permasalahan mengenai interkoneksi perdagangan di wilayah pedalaman dan pesisir pada masa Bali Kuno. Pendekatan geopolitik digunakan untuk membedah data yang ada, mengingat kajian ini berkaitan dengan politik dan teritori. Proses penelitian meliputi pengumpulan data, analisis data, dan penafsiran data. Data primer yang digunakan adalah beberapa prasasti masa Bali Kuno yang memiliki hubungan dengan aktivitas perdagangan serta yang ditemukan di daerah pedalaman dan pesisir utara Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara geopolitik terdapat pembagian zona produksi dan distribusi pada masa tersebut.

Kata Kunci: perdagangan; geopolitik; Bali Kuno

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang berperan penting dalam menyokong stabilitas perekonomian dari suatu negara adalah aktivitas niaga atau perdagangan. Aktivitas ini dapat terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam yang terdapat di suatu wilayah, baik sumber daya alam yang terlalu melimpah maupun sebaliknya. Tentunya hal itu dapat menyebabkan adanya penawaran dan permintaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dari masing-masing masyarakat di suatu wilayah. Aktivitas perdagangan khususnya dalam sektor maritim di Indonesia telah membuka kesempatan lebar terjadinya kontak budaya antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Aktivitas tersebut tidak hanya

dilakukan antarpulau di Nusantara, melainkan dilakukan juga dengan beberapa wilayah dari luar kepulauan Nusantara seperti Asia Tenggara, India, dan Cina (Agustijanto Indradjaja, 2014).

Pulau Bali yang berada di gugusan kepulauan Nusantara juga mengalami kontak budaya akibat adanya proses perdagangan tersebut. Data terkait adanya kontak budaya diketahui dari penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Denpasar sekarang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menunjukkan bahwa kontak perdagangan telah terjalin di bagian pesisir utara Bali sejak masa transisi prasejarah menuju permulaan abad Masehi (Ketut Sedana Arta, 2019). Penelitian yang dilakukan di daerah Pacung dan Sembiran juga menyebutkan hal yang serupa, yaitu adanya indikasi pelabuhan kuno yang memegang peranan penting dalam jalur perdagangan dunia (Ketut Sedana Arta, 2019; I Wayan Ardika, 1991). Kedua daerah tersebut adalah bagian dari *trans asiatic* atau jaringan perdagangan yang telah berkembang sejak akhir masa prasejarah, terbukti dari temuan gerabah arikamedu serta hasil uji temuan kaca, perunggu, emas, dan artefak berbahan karnelian yang dikomparasikan dengan temuan di situs-situs yang berada di wilayah Asia (Calo, et al., 2015; Wayan Sumerta, Gendro Keling, & A.R. Hidayah, 2017). Selain data temuan ekskavasi di atas, praktik perdagangan juga terekam dalam prasasti-prasasti yang berasal dari masa Bali Kuno.

Istilah-istilah yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan di dalam prasasti meliputi *pkēn* (pasar), *ser pasar* (kepala pasar), dan hari pasar, seperti *pasar wijaya pura*, *pasar wijaya manggala*, dan *pasar wijaya kranta*. Terdapat pula penyebutan *wanigrama* (saudagar laki-laki), *wanigrāmi* (saudagar perempuan), di atasnya terdapat *juru wanigrama* dan *juru wanigrāmi* sebagai pejabat yang bertugas mengatur segala kepentingan saudagar, baik laki-laki maupun perempuan. Para pedagang di dalam prasasti dikelompokkan berdasarkan cara-cara mereka berjualan, umumnya pedagang disebut sebagai *banyaga* (pedagang besar, pedagang antarpulau atau bahkan internasional) dan untuk pedagang kecil dikenal dengan istilah *atanja*, *manghalu*, *adagang* (Ketut Setiawan, 1997; Novita Destriana, 2014). Komoditas dagang pada masa tersebut meliputi hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan bahkan kerajinan tangan (I Nyoman Sunarya, 2017).

Rempah-rempah sebagai hasil pertanian menjadi salah satu komoditas yang diperdagangkan pada masa Bali Kuno. Prasasti Kintamani E tahun 1122 Śaka mencatat beberapa jenis rempah-rempah, seperti *ksumba* (kasumba), *bawang bang* (bawang merah), *bawang putih* (bawang putih), dan *jumuju* (jemuju/biji-bijian berbentuk seperti jintan) yang diperdagangkan di wilayah pesisir utara Bali tepatnya di Desa Les dan sekitarnya (I Putu Budiastara & Suandana, 1985; I Gede Prama Saputra Saputra & Coleta P. Titasari, 2018). Namun tentunya tidak menutup kemungkinan rempah-rempah jenis lain juga turut diperdagangkan. Hal itu ditunjukkan dari penyebutan jenis rempah-rempah lain, seperti *kamiri* (kemiri), *katumbar* (ketumbar), *kapulaga* (kapulaga), dan *pipakan* (jahe) di dalam prasasti-prasasti Bali Kuno (Ni Ketut Sumiartini & I Ketut Setiawan, 2017).

Komoditas perdagangan berupa hasil bumi yang telah disebutkan di atas sebagian besar tumbuh subur di wilayah pedalaman Bali. Jika ditinjau berdasarkan topografinya, Pulau Bali dipisahkan oleh pegunungan yang membentang dari sisi timur sampai barat. Berdasarkan kondisi tersebut maka terdapat dua pembagian wilayah yaitu *Den Bukit* (Bali bagian Utara) dan *Delod Bukit*

(Bali bagian selatan) (Ketut Sedana Arta, 2019). Daerah-daerah di pegunungan itulah yang dapat digolongkan sebagai daerah pedalaman Bali, sedangkan daerah di bagian utara bukit atau pegunungan merupakan daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan Laut Bali.

Melihat data yang telah diuraikan mengenai aktivitas perdagangan, baik dari hasil ekskavasi, pembacaan prasasti, dan kondisi geografis di atas, maka kajian mengenai geopolitik menjadi sangat menarik untuk dilakukan. Kajian ini berupaya untuk melihat pengaruh serta hubungan antara kondisi geografis terhadap ketatanegaraan. Pengklasifikasian terhadap suatu wilayah akibat dari kondisi geografis yang ada erat kaitannya dengan fenomena geopolitik, hal itu karena produk suprastruktur disesuaikan dengan kondisi geografis dari suatu wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan suatu negara dalam hal ini adalah sektor ekonomi (Sri Hayati & A. Yani, 2013; Muhammad Aljebra Aliksan Rauf & Rudini Hasyim Rado, 2021). Bertolak pada pengertian tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana interkoneksi antara wilayah pedalaman dan pesisir dalam pusran perdagangan pada masa Bali Kuno. Sudut pandang yang digunakan untuk membedah data yang ada adalah pendekatan geopolitik sehingga diketahui pengaruh kondisi geografis terhadap kebijakan pemerintahan khususnya dalam sektor perdagangan pada masa Bali Kuno.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dalam rangkaiannya terbagi menjadi tiga rangkaian, antara lain pengumpulan data, analisis data, dan penafsiran data untuk menarik sebuah simpulan. Penelitian diawali dari proses pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka. Data primer dalam penelitian ini adalah prasasti-prasasti Bali Kuno dari abad ke-9 sampai dengan abad ke-12 Masehi yang berkaitan dengan aktivitas niaga serta ditemukan di wilayah pedalaman dan pesisir Bali bagian utara. Data tersebut didapat dari berbagai pustaka, baik jurnal maupun buku. Setelah seluruh data terkumpul, tahap berikutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Metode analisis ini mengedepankan penjabaran atau penguraian dalam bentuk kalimat yang terstruktur dan sistematis berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan (Moloeng, 2014). Selain analisis tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan geopolitik sebagai kerangka berpikir. Pendekatan geopolitik diartikan sebagai sebuah ilmu yang memahami tentang hubungan antara politik dan teritori dalam suatu negara (Muhammad Aljebra AliksanRauf & Rudini Hasyim Rado, 2021). Penggunaan pendekatan ini dapat membantu penulis dalam membedah data prasasti yang ada, khususnya dalam hal kondisi geografis dan kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan di dalam prasasti. Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah penafsiran data, tujuannya untuk menarik suatu simpulan mengenai topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber-sumber Prasasti

Berdasarkan keabsahannya, prasasti menjadi sumber tertulis yang memiliki nilai kredibilitas paling tinggi untuk mengungkap kehidupan manusia pendukungnya. Data yang terkandung di

dalam prasasti sering digunakan sebagai data primer untuk menyusun kesejarahan periode klasik di Indonesia. Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat data yang terdapat di dalam prasasti adalah hasil cerminan kehidupan manusia pada masa dibuatnya sehingga bersifat orisinil dan dapat dipertanggungjawabkan (M. Alnoza, 2022). Prasasti-prasasti yang digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini adalah beberapa prasasti yang dapat memberikan penggambaran terkait dengan aktivitas perdagangan. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah terkait dengan lokasi yang disebutkan di dalamnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah geopolitik sehingga lokasi-lokasi penemuan prasasti berperan penting dalam proses analisis khususnya untuk mengetahui kondisi geografis dan kebijakan terkait perdagangan yang terdapat di dalam prasasti tersebut. Maka dari itu, pada sub bab ini dijabarkan mengenai prasasti-prasasti yang digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini. Pendeskripsian terhadap prasasti-prasasti tersebut dimaksudkan agar rentang masa pada prasasti tersebut dapat dipahami. Berikut merupakan prasasti-prasasti yang digunakan sebagai data primer.

Tabel 1 Data prasasti berdasarkan lokus penelitian

No	Nama Prasasti	Tahun	Nama Raja	Lokasi Penyimpanan
1	Prasasti Kintamani E	1122 Śaka	Sri Maharaja Ekajaya Lancana	Pura Bale Agung Kintamani
2	Prasasti Gobleg Pura Batur B	971 Śaka	Anak Wungsu	Pura Batur, Desa Gobleg
3	Prasasti Tamblingan Pura Endek IV	1041 Śaka	Suradhipa	Pura Endek, Desa Munduk
4	Prasasti Sembiran A IV	987 Śaka	Anak Wungsu	Desa Sembiran
5	Bebetin AI	818 Śaka	Tanpa nama raja	Desa Bebetin

Kelima prasasti yang terdapat pada tabel di atas telah memenuhi kriteria sebagai data primer dalam penelitian ini. Prasasti-prasasti tersebut memuat data mengenai aktivitas perdagangan. Selain itu, secara lokus masing-masing dari prasasti tersebut ditemukan di wilayah pedalaman dan pesisir Bali bagian utara. Kelompok prasasti yang mewakili wilayah pedalaman Bali adalah prasasti Kintamani E, prasasti Gobleg Pura Batur B, dan prasasti Tamblingan Pura Endek IV, sedangkan kelompok prasasti yang digunakan sebagai sampel untuk mewakili wilayah pesisir khususnya di bagian utara Bali adalah prasasti Sembiran A VI dan prasasti Bebetin AI (lihat gambar 1).

Prasasti Kintamani E yang dikeluarkan oleh raja Ekajaya Lencana memuat isi yang cukup kompleks mengenai aktivitas perdagangan yang menghubungkan antara daerah pegunungan Kintamani dengan daerah di pesisir Bali bagian utara. Sebagai salah satu dari data primer dalam penelitian ini, prasasti Kintamani E memberikan informasi yang sangat penting dalam mengungkap aktivitas perdagangan khususnya tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh raja berkaitan dengan letak geografis dan hubungannya dengan perekonomian pada masa tersebut. Berikut adalah bagian dari kutipan prasasti Kintamani E yang dijadikan sebagai sumber data.

3a. 3. “... *atêhêr karāman i cintamani sapāñjing thāni tkeng ana*

4. *kning karāman wnang adagang kapas mareng lês, paminggir hiliran, buhundalem, julah, purwasidhi, indrapura, bulihan, manasa tan sapan deni watek nāyakan ka*
5. *pas, apān wnang mūlannya, nguniweh songgwanya tanja kapas mwang ksumba, bawang bang, bawang putih, jumuju tan apakaranên, muwah sakweh ikang wwang I wingkang ranu tan wnang*
6. *adagang kapas mareng lês, paminggir, iliran, buhun dalem, julah, purwwasidhi, indrapura, bulihan, manasa, apa tan wnang mulanya, yapwan hana sakwe*
- 3b.1. *hwang I wingkang ranu adagang mareng lês, paminggir, bulihan, julah, purwwasidhi, indrapura, manasa yeka prasidha tan pamisinggih I sara*
2. *saning rāja prsasti anugraha nira pāduka çri mahārāja i karāman i cintamani sapañjing tāni, wnang alapên sawinawannya denikang karāman I cintamani*
3. *tan pangdadyakna disaning karāman kunang ikang wwang ing adagang kapas tan wurung dawuhana dosa mā sū 3 mā 2...* (I Putu Budiastira & Suandana, 1985; Novita Destriana, 2014).

artinya,

- 3a. 3. ‘...selanjutnya penduduk desa di Kintamani sewilayahnya sampai
4. anakning karaman diperbolehkan berjualan kapas sampai di Les, Paminggir, Hiliran, Buhun Dalem, Julah, Purwwasidhi, Indrapura, Bulihan, Manasa, tidak dilarang oleh nayakan ka
5. pas, sebab memang sejak semula diperbolehkan lebih-lebih kemanapun tempatnya menjajakan kapas ataupun kasumba, bawang merah, bawang putih, jumuju, tidak menyebabkan apa-apa, namun demikian seluruh orang-orang di tepi danau tidak diperbolehkan
6. berjualan kapas ke Les, Paminggir, Hiliran, Buhun Dalem, Julah, Purwwasidhi, Indrapura, Bulihan, Manasa, sebab memang tidak diperbolehkan sejak dulu. Tetapi apabila ada sejumlah
- 3b. 1. orang-orang dari tepi danau datang berdagang di Les, Paminggir, Bulihan, Julah, Purwwasidhi, Indrapura, Manasa, hal itu patut tidak dibenarkan sesuai dengan isi
2. prasasti anugrah baginda Paduka Sri Maharaja kepada penduduk desa di Kintamani sewilayahnya. Seluruh bawaannya boleh diambil oleh penduduk desa Kintamani
3. tidak mengakibatkan dosa penduduk desa, sebaliknya orang-orang yang berdagang kapas, tidak urung dijatuhi denda 3 ma su 2 ma...’ (I Putu Budiastira & Suandana, 1985; Novita Destriana, 2014)

Melalui informasi yang tercantum di dalam prasasti Kintamani E dapat diketahui bahwa pada masa Bali Kuno telah terdapat jaringan perdagangan yang menghubungkan antara wilayah pedalaman (Pegunungan Kintamani) dengan wilayah pesisir utara Bali (Les, Paminggir, Hiliran, Buhun Dalem, Julah, Purwwasidhi, Indrapura, Bulihan, dan Manasa). Selain menyebutkan

toponimi daerah-daerah di sekitar pesisir Bali utara, di dalam prasasti tersebut juga dijelaskan jenis komoditas yang diperdagangkan pada masa tersebut. Kapas menjadi komoditas primadona yang disebutkan di dalam prasasti, diikuti dengan beberapa jenis rempah-rempah, seperti kasumba, bawang merah, bawang putih, dan jemuju (biji-bijian yang bentuknya seperti jintan) yang turut menjadi barang dagangan pada masa tersebut.

Prasasti lainnya yang mengindikasikan bahwa terdapat jaringan perdagangan yang saling berhubungan antara daerah pedalaman dan pesisir di Bali utara adalah prasasti Gobleg Pura Batur B dan prasasti Tamblingan Pura Endek IV (I Gusti Made Suarbhawa, 2010). Kutipan dari kedua prasasti tersebut yang mempertegas adanya hubungan perdagangan adalah “*para nayaka i manasa*” yang berarti para pejabat kerajaan di Manasa (Ketut Sedana Arta, 2019). Penyebutan Manasa pada kedua prasasti tersebut menjadi kata kunci yang sangat penting dalam hubungannya dengan jaringan perdagangan di wilayah pesisir utara Bali. Prasasti Sembiran A IV semakin memperkuat posisi Manasa sebagai daerah penting pada masa Bali Kuno khususnya dalam aktivitas perdagangan. Hal tersebut termuat dalam kutipan isi prasasti sebagai berikut.

“...*mangkana yan hana banyaga sakeng sabrang jong, bahitara, camunduk I manasa hatpani katkanannya wnanga ikanang karaman patrakasihana uliyana hatep mulyan ma I anglepibana sargha mahajana tan papacasuka, tan kna paksa ya, ika ta yan pamana sang hyang ajna haji tinumbuk lelek paduka haji...*” (Ida Bagus Santosa, 1965; I Gusti Made Suarbhawa, 2010).

artinya,

“...jika ada saudagar dari seberang laut datang dengan perahu kecil, perahu besar berlabuh di Manasa yang merapat datangnya, biaya merapat maksimal 1 masaka, dan harganya dilebihkan bagi orang terkemuka, tidak dikenai sumbangan pengawasan, dan tidak ada pemaksaan, jika mereka menunjukkan surat perintah membayar biaya berlabuh yang ditulis oleh paduka raja....” (Ida Bagus Santosa, 1965; I Gusti Made Suarbhawa, 2010).

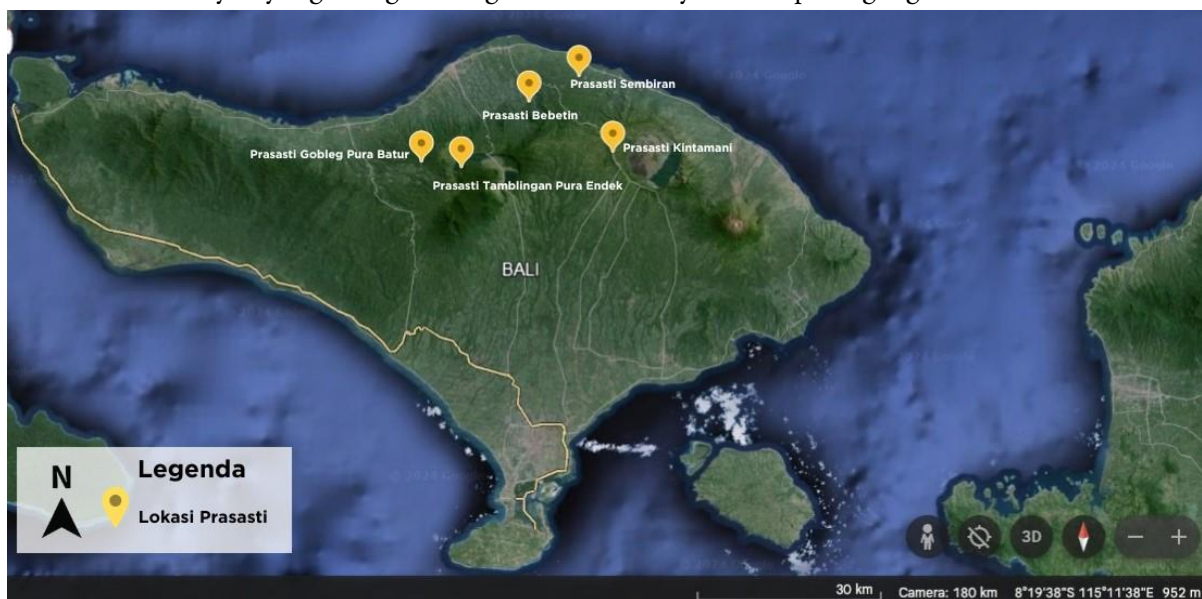
Berdasarkan isi dari prasasti Sembiran A IV dapat diketahui bahwa daerah pesisir di Bali utara telah dimanfaatkan sebagai pelabuhan yang menjadi tempat bongkar muat bagi perahu-perahu berbagai ukuran dari seberang pulau. Melalui isi prasasti tersebut diketahui pula jenis pajak dan mekanisme pembayaran pajak bagi para pedagang yang berlabuh di Manasa. Prasasti terakhir yang dijadikan sebagai data primer di dalam penelitian ini adalah prasasti Bebetin AI, kutipan dalam prasasti ini menjelaskan mengenai kewajiban pajak yang dikenakan kepada para pedagang atau saudagar dari luar pulau yang sedang berlabuh di Kota Pelabuhan Julah. Berikut adalah kutipan isi dari prasasti Bebetin AI yang menyatakan hal tersebut.

“...*anada tua banyaga turun ditu, paniken di hyang api parunggahanya, ana mati ya tua banyaga, parduan drbya prakara, ana cakcak lañcangña kajadian papagerangen 4. Kuta,...*”

(I Wayan Ardika & N.S. Beratha, Perajin pada Masa Bali Kuno, 1996; Goris, 1954; I Wayan Ardika, Ketanggihan dan Kerawanan Masyarakat Pesisir pada Masa Bali Kuno, 2023) artinya,

“...bila ada pedagang asing yang berlabuh di sana, persembahannya dipersembahkan untuk Hyang Api, apabila pedagang asing tersebut meninggal maka dibagi dua miliknya dan lain lain, apabila perahunya pecah, kayunya dapat digunakan untuk pagar tempat pemukiman di pesisir (kuta) di Banwa Bharu...” (I Wayan Ardika & N.S. Beratha, Perajin pada Masa Bali Kuno, 1996; Goris, 1954; I Wayan Ardika, Ketanggihan dan Kerawanan Masyarakat Pesisir pada Masa Bali Kuno, 2023).

Berdasarkan isi dari prasasti yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa daerah Bali bagian utara telah ramai didatangi oleh para pedagang atau saudagar dari seberang pulau. Hal itu pula yang mengindikasikan adanya aktivitas perdagangan internasional di daerah tersebut. Prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah pedalaman antara lain di daerah Kintamani dan Tamblingan juga menyebutkan toponimi dari daerah-daerah yang terdapat di pesisir Bali utara. Toponimi dari daerah-daerah pesisir yang disebutkan di dalam prasasti tersebut antara lain adalah Les (Desa Les), Paminggir menurut (I Putu Budiastira, Wayan Wardha, & I Gede Putu Ekawana, 1985) toponimi tersebut saat ini dikaitkan dengan wilayah Desa Tejakula, Hiliran (belum diketahui lokasi pastinya), Buhun Dalem (Desa Bondalem), Julah (Desa Julah), Purwasidhi (belum diketahui lokasi pastinya), Indrapura menurut (I Putu Budiastira, Wayan Wardha, & I Gede Putu Ekawana, 1985) toponimi tersebut saat ini dikaitkan dengan wilayah Desa Depeha, Bulihan (Desa Bulian), dan Manasa (kemungkinan di Desa Sinabun karena terdapat sebuah pura yang bernama Pura Subak Manasa) (lihat gambar 2). Penyebutan toponimi tersebut menjadi penanda yang kuat adanya hubungan antara kedua wilayah yang saling bersangkutan khususnya dalam perdagangan.



Gambar 1 Peta persebaran prasasti
(Sumber: Google Earth diakses dan diolah 16 April 2024)

Analisis Geopolitik Masa Bali Kuno

Keadaan alam atau kondisi geografis dari suatu wilayah memiliki sifat yang mutlak (Surya Wiranto, 2020). Artinya bahwa keadaan alam tersebut telah terbentuk sejak lama dan menjadi ciri penanda dari suatu wilayah. Sejalan dengan pernyataan tersebut, maka untuk memanfaatkan kondisi alam yang dimiliki oleh suatu wilayah diperlukan pemahaman mengenai geopolitik. Istilah geopolitik ini pertama kali diperkenalkan oleh Karl Haushofer saat mendirikan *Institut fut Geopolitik* dengan beberapa profesor Geografi Jerman pada tahun 1925. Berangkat dari buah pemikiran Karl Haushofer tersebut, geopolitik hadir sebagai sebuah teori yang memberikan pandangan kepada suatu negara dalam melihat wilayahnya (Muhamad R. Iswardhana, 2023). Pengertian geopolitik sebagai suatu pendekatan ilmiah juga dapat dipahami dalam pengertiannya sebagai sebuah studi untuk memahami tentang realitas geografis yang dihadapi oleh suatu negara nyatanya memiliki kaitan dengan kelompok manusia dan kekuasaan (Kris Wijono Soepandji, 2019). Merujuk pada beberapa pernyataan yang sudah dipaparkan tersebut dapat diketahui bahwa interaksi yang tercipta dari kondisi geografis dan masyarakat dapat memengaruhi produk politik atau kebijakan yang diciptakan oleh suatu negara.

Kendati perkembangan mengenai kajian geopolitik masih terhitung baru, namun dengan adanya pendekatan ini dapat menjadi salah satu pisau analisis yang bisa digunakan untuk memahami masa lalu, khususnya dalam melihat pengaruh alam terhadap penentuan suatu kebijakan. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan melihat realitas geografis di tempat prasasti-prasasti tersebut ditemukan atau wilayah-wilayah yang disebutkan di dalam prasasti itu sendiri, dalam studi kasus ini adalah wilayah pedalaman dan pesisir Bali utara. Selain melihat kondisi geografisnya, penting juga untuk melihat substansi dari isi prasasti tersebut sehingga dapat diketahui mengenai latar belakang kondisi geografis dan kebijakan yang tertera di dalam prasasti.



Gambar 2 Toponimi dalam prasasti Kintamani E dan Tamblingan Pura Endek IV
(Sumber: Google Earth diakses dan diolah 9 Februari 2025)

Berdasarkan pendeskripsian yang telah dilakukan terhadap sumber prasasti pada sub bab sebelumnya, diketahui bahwa substansi yang terdapat di dalam prasasti-prasasti tersebut menunjukkan adanya fenomena geopolitik. Fenomena ini tertuang dalam beberapa hal termasuk dalam bentuk kebijakan khususnya yang berkaitan dengan strategi geopolitik pada bidang ekonomi atau perdagangan. Misalnya yang terdapat pada prasasti Kintamani E, dalam prasasti tersebut disampaikan bahwa raja memberikan kebijakan berupa hak otonomi khusus kepada masyarakat Kintamani agar dapat menjajakan kapas sampai di daerah-daerah pesisir Bali bagian utara. Bahkan di dalam prasasti sangat jelas disebutkan bahwa orang-orang di tepi Danau Batur (*Wing kang Ranu*) tidak diperbolehkan berjualan kapas ke wilayah Les, Paminggir, Hiliran, Buhun Dalem, Julah, Purwwasidhi, Indrapura, Bulihan, dan Manasa. Apabila itu terjadi, maka masyarakat Kintamani memiliki hak untuk mengambil barang dagangannya dan tidak akan dikenakan dosa, sebaliknya orang-orang di tepian Danau Batur yang melanggar akan dikenakan denda.

Kebijakan yang diambil oleh raja dengan memberikan hak khusus kepada masyarakat Kintamani bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan prasasti Sukawana D, secara geografis memang kawasan ini menjadi sentra kapas karena banyaknya tanaman kapas yang tumbuh subur di sekitar sisi timur Desa Sukawana, Panursuran, dan Balingkang (I Wayan Wardha, 1985; I Gusti Made Suarbhawa, 2010). Selain itu, adanya toponimi desa kuno yang memiliki nama Kayu Kapas di Kintamani juga turut memperkuat bahwa wilayah tersebut memang menjadi daerah yang banyak ditanami pohon kapas (Novita Destriana, 2014). Berdasarkan keterangan dalam prasasti Kintamani E yang kemudian diperkuat dengan keterangan dalam prasasti Sukawana D, fenomena geopolitik yang muncul di dalamnya adalah pemahaman akan kondisi geografis yang dimiliki oleh raja dalam menentukan kebijakan terkait dengan perdagangan khususnya adalah perdagangan kapas.

Prasasti Kintamani E juga mencatat adanya komoditas lain seperti kasumba, bawang merah, bawang putih, dan jemuju yang turut diperdagangkan ke daerah-daerah di pesisir Bali utara. Komoditas pertanian ini tentunya dapat tumbuh di wilayah-wilayah tertentu dengan tingkat kesuburan tanah yang baik. Wilayah yang dimaksud adalah wilayah pedalaman Bali (pegunungan) seperti di daerah Kintamani. Selain di Kintamani, berdasarkan prasasti Tamblingan Pura Endek IV dan prasasti Gobleg Pura Batur B yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, daerah pedalaman di sekitar Danau Tamblingan juga memiliki kondisi yang hampir sama terkait dengan tingkat kesuburan tanahnya. Kondisi geografis di wilayah-wilayah tersebut sangat mendukung adanya pemukiman dan aktivitas bercocok tanam karena memiliki tanah yang subur akibat adanya aktivitas gunung berapi (I Wayan Suantika, 2017). Kendati dalam prasasti Tamblingan Pura Endek IV dan prasasti Gobleg Pura Batur B tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai aktivitas ekonomi atau perdagangan, penyebutan kalimat "*nayaka i manasa*" cukup merepresentasikan eksistensi pejabat kerajaan yang bertugas di Manasa (diperkirakan di pesisir Bali utara) dengan wilayah-wilayah pedalaman Bali khususnya di sekitar Danau Tamblingan. Konektivitas antara kedua wilayah ini penting untuk melihat peran raja dalam memandang realitas geografisnya, terlebih kaitannya dengan aktivitas perekonomian.

Menurut teori geopolitik, kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara ditentukan oleh kecakapannya dalam membangun persatuan dan kesatuan nasional, pembinaan serta pelaksanaan politik luar negeri (Wulan A. Ayu, 2020). Jika mengacu pada pernyataan tersebut, maka penyebutan kalimat “*nayaka i manasa*” dalam prasasti Tamblingan Pura Endek IV dan prasasti Gobleg Pura Batur B dapat diartikan sebagai upaya penyatuan antara wilayah pedalaman dan pesisir Bali utara yang mengarah pada aktivitas perdagangan. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk memperkuat posisi politik dalam negeri dan kelangsungan perekonomian kerajaan. Besar kemungkinan istilah ‘*nayaka*’ dalam kedua prasasti tersebut merujuk pada sebuah jabatan sipil yang mengurus aktivitas perdagangan.

Berdasarkan konektivitas tersebut apabila ditelaah menggunakan pendekatan geopolitik, maka terlihat adanya pembagian zona perekonomian yang meliputi dua wilayah berdasarkan karakteristik geografisnya masing-masing. Zona perekonomian yang tercermin dari data prasasti khususnya dalam prasasti Kintamani E, Pura Endek IV, dan Gobleg Pura Batur B adalah adanya zona produksi dan distribusi. Daerah di pedalaman Bali seperti di Pegunungan Kintamani dan di sekitar Danau Tamblingan menjadi zona produksi, di tempat inilah dibudidayakannya berbagai jenis tumbuhan yang menjadi komoditas perdagangan. Tipikal tanah yang subur menjadikan daerah-daerah tersebut cocok untuk dijadikan sebagai zona produksi. Kebijakan yang tertuang dalam prasasti Kintamani E berupa hak khusus yang diberikan kepada masyarakat Kintamani untuk menjalankan otonomi yakni dengan berjualan kapas sampai di wilayah pesisir Bali utara adalah salah satu upaya untuk menjaga keteraturan perekonomian kerajaan. Kebijakan khusus yang diberikan kepada masyarakat tersebut tentunya dapat memaksimalkan potensi alam yang ada di wilayahnya tanpa harus bersaing dengan wilayah lain.

Zona kedua yang tercermin sebagai fenomena geopolitik pada kebijakan prasasti masa Bali Kuno adalah zona distribusi. Zona ini merupakan tempat-tempat pendistribusian dan pemasaran berbagai jenis komoditas seperti hasil alam dan pertanian yang sebelumnya telah dibudidayakan di zona produksi. Pesisir Bali utara telah menunjukkan pamornya sebagai zona distribusi sejak awal abad masehi, daerah-daerah yang disebutkan di dalam prasasti Kintamani E, yaitu Les, Paminggir, Hiliran, Buhun Dalem, Julah, Purwasidhi, Indrapura, Bulihan, dan Manasa menjadi muara dari aktivitas pasca produksi yang dilakukan di wilayah pedalaman Bali. Dua prasasti yang digunakan sebagai sampel untuk mewakili daerah pesisir yaitu prasasti Sembiran A IV dan Bebetin AI turut memberikan informasi mengenai kebijakan politik berupa wajib pajak yang dikenakan kepada para saudagar dari seberang pulau ketika berlabuh di pesisir Bali utara. Kebijakan politik ini juga dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan perekonomian kerajaan.

Secara geografis wilayah pesisir Bali utara memiliki letak yang sangat strategis, selain itu kondisi laut yang lebih tenang menjadikan wilayah ini cocok untuk dijadikan sebagai tempat berlabuh perahu-perahu yang masih menggunakan navigasi sederhana (Ketut Sedana Arta, 2019). Berdasarkan hal itulah wilayah pesisir Bali utara secara geopolitik dipilih sebagai kota pelabuhan. Wilayah ini menjadi tempat bongkar muat kapal atau perahu sekaligus pendistribusian komoditas

perdagangan dari daerah pedalaman menuju berbagai daerah di luar Pulau Bali (I Komang Ayu Astiti, 2018). Potensi kemaritiman yang dimiliki oleh daerah pesisir Bali utara dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh raja untuk memperkuat posisinya dalam bidang perekonomian sekaligus politik.

Selain keuntungan-keuntungan sebagai kota pelabuhan yang ramai dikunjungi para pedagang, daerah pesisir Bali utara secara kewilayahan juga memiliki ancaman dari luar akibat posisinya sebagai pintu gerbang masuknya orang-orang dari berbagai pulau. Ancaman yang dihadapi oleh masyarakat di pesisir Bali utara seperti serangan musuh dan perampokan bajak laut menjadi bentuk kerawanan tersendiri bagi daerah pesisir tersebut (I Wayan Ardika, 2023). Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan khusus yang diberikan kepada masyarakat di pesisir Bali utara agar dapat mempertahankan keutuhan serta keamanan wilayahnya. Kebijakan tersebut terealisasi dalam bentuk *tawan karang*. Fenomena ini salah satunya terdapat di dalam prasasti Bebetin AI, seperti yang telah dipaparkan pada bagian deskripsi data prasasti, dijelaskan bahwa masyarakat pesisir (*kuta*) di Banwa Bharu diperbolehkan mengambil kekayaan yang dimiliki oleh para pedagang jika si pedagang telah meninggal, dan apabila perahu dari pedagang tersebut pecah, kayunya dapat digunakan sebagai pagar tempat permukiman. Kebijakan yang diberikan oleh raja dalam prasasti tersebut menjadi bentuk hak istimewa sebagai upaya menyejahterakan dan menjadi bentuk ketangguhan bagi masyarakat di pesisir (I Wayan Ardika, 2023).

KESIMPULAN

Data yang termuat di dalam prasasti masa Bali Kuno sebagai produk kebijakan yang dikeluarkan oleh raja mengandung unsur-unsur fenomena geopolitik dalam penyusunannya. Uraian dari prasasti-prasasti tersebut memberikan informasi bahwa penguasa pada masa Bali kuno mencoba “membagi dunia” ke dalam dua zona berdasarkan karakteristik geografisnya. Pembagian yang dimaksud adalah zona produksi dan distribusi. Pembagian zona ini berkaitan dengan bidang perekonomian khususnya aktivitas perdagangan yang menyebabkan adanya pola konektivitas antara masyarakat di pedalaman dan pesisir Bali. Zona pertama meliputi wilayah pedalaman Bali (Pegunungan Kintamani dan wilayah di sekitar Danau Tamblingan) yang merujuk sebagai zona produksi. Selanjutnya adalah wilayah pesisir Bali utara sebagai zona distribusi dari komoditas yang telah diproduksi oleh masyarakat di wilayah pedalaman Bali. Sebagai pusat perdagangan, wilayah pesisir Bali utara memegang peran penting tidak hanya sebagai daerah distribusi, sangat besar kemungkinan daerah ini juga memiliki potensi untuk memproduksi komoditas perdagangan. Namun sayangnya data prasasti di wilayah pesisir Bali utara tidak menyebutkan seberapa besar hasil bumi atau rempah-rempah yang dihasilkan sehingga bisa disebut sebagai pusat produksi. Kendati demikian, wilayah ini tetap menjadi titik penting yang berfungsi sebagai pelabuhan transit dan pertemuan kapal-kapal regional atau internasional. Melihat realitas geografis dari suatu wilayah menjadi suatu hal yang perlu untuk dilakukan dalam menentukan arah kebijakan dari suatu negara. Mengetahui realitas geografis berarti mengetahui kekuatan dan kelemahan dari masing-masing wilayah berdasarkan kondisi alam dan bentuk ancamannya. Pemahaman terkait kondisi geografis

yang diselenggarakan dengan produk kebijakan politik tentunya dapat memperkuat keutuhan negara atau dalam studi kasus ini adalah kerajaan Bali Kuno khususnya dalam sektor perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustijanto Indradjaja. (2014). Awal Pengaruh Hindu Buddha Di Nusantara. *Kalpataru*, 17-34.
- Calo, A., Bagyo Prasetyo, Bellwood, P., Lankton, J., Gratuze, B., Pryce, T. O., . . . Carter, A. (2015). Sembiran and Pacung on the north coast of Bali: a Strategic Crossroads for Early Trans-Asiatic Exchange. *Antiquity*, 378-396.
- Goris, R. (1954). *rasasti Bali I & II*. Bandung: Masa Baru.
- I Gede Prama Saputra & Coleta P. Titasari. (2018). Prasasti Kintamani E Kajian Epigrafi. *Humanis*, 6-12.
- I Gusti Made Suarbhawa. (2010). Perdagangan pada masa Bali kuna: Berdasarkan Sumber-sumber Prasasti. *Forum Arkeologi*, 215-236.
- I Komang Ayu Astiti. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Pelabuhan-pelabuhan Kuno di Buleleng dalam Pengembangan Pariwisata. *Forum Arkeologi*, 75-92.
- I Nyoman Sunarya. (2017). Aktivitas perdagangan masyarakat Kintamani dan sekitarnya pada Masa Bali Kuno (Kajian Data Prasasti). *Forum Arkeologi*, 19-29.
- I Putu Budiastara & Suandana. (1985). *Museum Subak*. Bali: Direktorat Jendral Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan.
- I Putu Budiastara, Wayan Wardha, & I Gede Putu Ekawana. (1985). *Prasasti Pura Bale Agung Kintamani Bangli*. Bali: Direktorat Permuseuman Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan .
- I Wayan Ardika & N.S. Beratha. (1996). *Perajin pada Masa Bali Kuno*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- I Wayan Ardika. (1991). The Beginning of Bronze Metallurgy in Bali. *High Bronze Age I Southeast Asia* . Hua Hin.
- I Wayan Ardika. (2023). *Ketangguhan dan Kerawanan Masyarakat Pesisir pada Masa Bali Kuno*. Magelang: Taksaka.
- I Wayan Suantika. (2017). Permukiman Kuno di Tepian Danau-danau di Bali. *Forum Arkeologi*, 29-38.
- I Wayan Wardha, I. (1985). Perdagangan dan Komoditi dalam Jaman Bali Kuna (Suatu Kajian dari Temuan Empat Lembar Prasasti Perunggu di Pura Bale Agung, Kintamani). *Pertemuan Ilmiah Arkeologi III*. Ciloto: Puslit Arkenas.
- Ida Bagus Santosa. (1965). *Prasasti-prasasti Raja Anak Wungsu di Bal*. Denpasar: Skripsi Universitas Udayana.
- Ketut Sedana Arta. (2019). Perdagangan di Bali Utara Zaman Kerajaan Bali Kuno Perspektif Geografi Kesejarahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 112-212.
- Ketut Setiawan (1997). *Sekilas Tentang Perdagangan Pada Masa Bali Kuna: Data Prasasti*. Denpasar: PT. Upada Sastra.
- Kris Wijono Soepandji. (2019). Geopolitik, Negara, dan Bangsa Masa Kini. *Jurnal Lemhannas RI*, 41-58.
- Moloeng, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya .
- Muhamad Alnoza. (2022). Piyagēm Sukapura (1641 M): Geopolitik Kerajaan Mataram Islam di Priangan. *AMERTA*, 179-192.
- Muhamad R. Iswardhana. (2023). Analisis Tata Kelola Maritim Indonesia: Implementasi Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 125-139.
- Muhammad Aljebra Aliksan Rauf & Rudini Hasyim Rado. (2021). Geopolitik Internasional Heartland Ke Asia Pasifik; Indonesia New Competitor. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 893-904.
- Ni Ketut Sumiartini & I Ketut Setiawan. (2017). Tumbuh-Tumbuhan yang Dimanfaatkan pada Masa Bali Kuno Abad X-XI M (Kajian Epigrafi). *Humanis*, 169-177.

- Novita Destriana. (2014). Perdagangan Kapas Pada Masa Bali Kuno Berdasarkan Prasasti Kintamani D Dan E (Kajian Epigrafi). *Humanis*, 1-8.
- Sri Hayati & A. Yani. (2013). *Geografi Politik*. Bandung: Refika Aditama.
- Surya Wiranto. (2020). Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Melalui Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia: Perspektif Pertahanan Maritim. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 1-16.
- Wayan Sumerta, Gendro Keling, & A.R. Hidayah. (2017). Potensi Sumberdaya Arkeologi Maritim di Pesisir Pantai Tejakula, Buleleng. *Sangkhakala*, 66-78.
- Wulan A. Ayu. (2020). Strategi Politik Arya Wiraraja dalam Pemerintahan Kerajaan Lamajang Tigang Juru Tahun 1295–1316 Masehi. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*.